

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOKHAMMAD NAJIH**
2. Jabatan : **KETUA OMBUDSMAN RI**
3. NHK : **852400**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.466.900.000**

1. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 277.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/72 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 198.900.000
3. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 176.000.000
4. Tanah Seluas 220 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 176.000.000
5. Tanah Seluas 87 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp.
69.600.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/150 m2 di KAB / KOTA
MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 198.900.000
7. Tanah Seluas 2800 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
8. Tanah Seluas 3200 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **384.500.000**

1. MOTOR, HONDA NF125TD M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UY125SA/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000



3. MOTOR, HONDA NF125TRF Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
4. MOTOR, HONDA CBR150R Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
9.500.000
5. MOTOR, HONDA SPD. MOTOR Tahun 1987, HASIL SENDIRI Rp.
500.000
6. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.4G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
360.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	60.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.912.000.000
III. HUTANG	Rp.	333.333.330
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.578.666.670

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.